



LAPORAN KINERJA BIDANG INVESTIGASI

PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2022



OT.04/LPP-01/PW27.5/2023
15 JANUARI 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Bab I Pendahuluan	
A. Tugas Dan Fungsi Organisasi	1
B. Struktur Organisasi	2
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Target Kinerja Tahun 2020 – 2024	3
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	4
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	7
B. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2022	13
C. Capaian Kinerja Lainnya	13
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022	20
B. Rencana Tindak Tahun 2023	20

KATA PENGANTAR

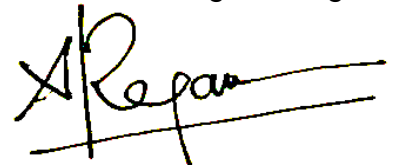
Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan *cascading* dan menetapkan Perjanjian Kinerja untuk seluruh Koordinator Pengawasan dan Kepala Bagian Umum.

Laporan Kinerja Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 merupakan media akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran kegiatan tahun 2022 yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Koordinator Bidang Pengawasan Investigasi Tahun 2022.

Penyajian Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor HK.01/SE-11/SU/ 01/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022.

Semoga Laporan Kinerja Tahun 2022 Bidang Investigasi ini bisa memberikan manfaat bagi Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melakukan evaluasi kinerja dan menetapkan langkah strategis untuk peningkatan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di tahun mendatang.

Korwas Bidang Investigasi



Sjachroel Hidayat Siregar

INVESTIGATOR



Sjachroel Hidhayat Siregar
Auditor Madya



Poedja Dwiatma
Auditor Muda



Rudi Sarwoaji
Auditor Muda



Sidki Mustakim
Auditor Pertama



Arga Ariegunantoro
Auditor Pelaksana



Akbar Yoga Pratama
Auditor Pelaksana



Wins Mosca Pratama
Auditor Pelaksana



Nufus Wirahadi Kusuma
Auditor Pelaksana



Jeremy Valentino Monang Panjaitan
Auditor Pelaksana

579,93%

Realisasi Nilai Penyelamatan
Keuangan Negara dan Daerah
dari Target

Rp23.197.176.917,12



Audit Investigatif
2 Penugasan



**Pemberian
Keterangan Ahli**
16 Kali PKA



Audit PKKN
6 Penugasan

Kegiatan Pengawasan Preventif dan Edukatif

- 1 Sosialisasi MPAK
- 1 Diagnostic Assessment FCP
- 1 Coaching Clinic
- 3 IEPK Pemerintah Daerah
- 3 Edukasi Anti Korupsi
- 5 Profiling Risiko Kecurangan

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022, disusun dalam rangka mendukung kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala Perwakilan di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Sehubungan dengan tugas tersebut, maka Bidang Investigasi melaporkan kepada Kepala Perwakilan tentang permasalahan investigasi dalam perspektif pengawalan akuntabilitas pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset, dan peningkatan *governance system*.

Tugas Bidang Investigasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Audit Investigatif.
2. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).
3. Pemberian Keterangan Ahli (PKA).
4. Audit Penyesuaian Harga (Audit PH).
5. Audit Klaim.
6. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP).
7. Fraud Control Plan (FCP) terdiri atas:
 - a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis FCP.
 - b. Diagnostic Assessment.
 - c. Evaluasi atas Implementasi FCP.
8. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).
9. Audit Dengan Tujuan Tertentu Lainnya Bidang Investigasi (ATTLBI)
10. Coaching Clinic Pengawasan Bidang Investigasi
11. Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK).
12. Penilaian Risiko Kecurangan/Fraud Risk Assessment (FRA).
13. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Bidang Investigasi dipimpin oleh Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan yang membawahi kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Perwakilan.

Saat ini Korwas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dijabat oleh Sjachroel Hidhayat Siregar sejak tanggal 23 Januari 2021 berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor KEP-633/K/SU/2021 Tanggal 27 Desember 2021

Jumlah pegawai Bidang Investigasi per 31 Desember 2022 sebanyak 9 orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Golongan
1.	Sjachroel Hidhayat Siregar NIP. 19650207 198603 1001	Auditor Madya	IV/c
2.	Poedja Dwiatma NIP. 19661217 198603 1 001	Auditor Muda	III/d
3.	Rudi Sarwoaji NIP. 19700608 199703 1 001	Auditor Muda	III/d
4.	Sidki Mustakim NIP 19900501 201201 1 001	Auditor Pelaksana	III/a
5.	Arga Ariegunantoro NIP. 19960322 201801 1 001	Auditor Pelaksana	II/d
6.	Akbar Yoga Pratama NIP. 19970517 201812 1 002	Auditor Pelaksana	II/d
7.	Wins Mosca Pratama NIP. 20000113 202101 1 001	Auditor Pelaksana	II/c
8.	Nufus Wirahadi Kusuma NIP. 20010326 202202 1 001	Auditor Pelaksana	II/c
9.	Jeremy Valentino Monang Panjaitan NIP. 20000531 202202 1 001	Auditor Pelaksana	II/c

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BPKP yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 diformulasikan dalam visi BPKP, yaitu Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan misi:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
2. Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2020 – 2024

Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan penjabaran dari program strategis sesuai visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Visi dan misi serta tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPKP yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020 – 2024. Program untuk menunjang kegiatan tersebut terdiri dari program pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan program dukungan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum.

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ditargetkan tahun 2020 – 2024 terdiri dari 6 sasaran kegiatan dengan 45 indikator kinerja yang terdiri dari 32 indikator kinerja kegiatan pengawasan (*delivery*) dan 13 indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan (*enabler*). Dari 32 indikator kinerja kegiatan pada Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2000 – 2024 yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Kegiatan pada Bidang Investigasi terdiri dari 5 (lima) IKK yaitu:

No	Sasaran/Indikator Kinerja kegiatan		Target Kinerja					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah							
	1.	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	Rp. (juta)	27.124	40.679	49.715	56.500	51.982
B.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional							
	1.	Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	Persen	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00
C.	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi							
	1.	Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2.	Persentase hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti	Persen	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
	3.	Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Jumlah Pemda	0	0	2	3	4

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Untuk menilai kegiatan pada tahun 2022, telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Korwas Bidang Investigasi sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Kepala Perwakilan BPKP dengan Korwas Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Perjanjian Kinerja tersebut menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran kegiatan dengan menetapkan target indikator kinerja kegiatan. Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

memuat 3 (dua) sasaran kegiatan dengan 7 indikator kinerja kegiatan pengawasan (*delivery*) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah	1. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp (juta)	4.000,00
2. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas pembangunan nasional	1. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85,00
	2. Persentase rekomendasi startegis yang ditindaklanjuti	Persen	80,00
3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi	1. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100,00
	2. Persentase hasil pengawasan preventif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	80,00
	3. Jumlah pemda dengan efektifitas pengendalian korupsi baik	Pemda	2,00
	4. Jumlah pemda menindaklanjuti are of improvement dengan hasil pengukuran EPK baik	Pemda	1.00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022, Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mengumpulkan data kinerja yang merupakan capaian realisasi indikator kinerja atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, informasi yang mendukung/menghambat capaian kinerja, capaian realisasi dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan, upaya peningkatan kinerja ke depan.

Data kinerja yang diperoleh diharapkan menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip manfaat dan biaya, efisiensi, serta efektivitas.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
A. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah	1. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rp. (juta)	4.000,00	23.197,18	579,93 %
B. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas pembangunan nasional	1. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85,00	85,00	100,00 %
	2. Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80,00	80,00	100,00 %
C. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi	1. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan /ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00 %
	2. Persentase hasil pengawasan preventif yang dimanfaatkan /ditindaklanjuti	Persen	80,00	80,00	100,00 %
	3. Jumlah pemda dengan efektifitas pengendalian korupsi baik	Pemda	2,00	1,00	50,00 %
	4. Jumlah pemda menindaklanjuti are of improvement dengan hasil pengukuran EPK baik	Pemda	1,00	1,00	100 %

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

1. Sasaran Kegiatan 1 - Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah.

- **Indikator Kinerja Kegiatan - Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah.**

Capaian kinerja Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar 579,93 % dari target. Capaian ini diperoleh dari realisasi sebanyak 2 (dua) audit investigatif dan 6 (enam) audit PKKN dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp23.197.176.917,12 dibandingkan dengan target sebesar Rp4.000.00.00,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kasus	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Babo.	3.035.000.000,00
2.	Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Rehabilitasi Kebun Kakao).	1.061.004.100,00
3.	Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa pada Kampung Bakaro.	533.987.004,43
4.	Audit PKKN atas Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.	1.037.822.000,00
5.	Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Pengamanan Pilkada.	1.205.000.000,00
6.	Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan.	386.477.274,00
7.	Audit PKKN atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hasil Penjualan Beras PNS Otonom	14.991.741.755,30
8.	Audit Investigatif Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19	946.144.783,39
	TOTAL	23.197.176.917,12

2. Sasaran Kegiatan 2 - Meningkatnya Pengawasan Pembangunan Atas Pembangunan Nasional.

- a. **Indikator Kinerja Kegiatan - Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan.**

Capaian kinerja Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja ini diperoleh dari penyelesaian atas sengketa antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Raja Ampat terkait masalah kewenangan memungut Pajak Air atas penggunaan air oleh Wajib Pajak PT Gag Nickel.

Atas permasalahan tersebut Bidang Investigasi telah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak dan masalah telah diselesaikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan antara Bapenda Provinsi Papua Barat dan BP2RD Kabupaten Raja Ampat.

b. Indikator Kinerja Kegiatan - Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti.

Capaian kinerja Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja ini diperoleh atas dilaksanakannya rekomendasi Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Pemungutan Pajak antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Raja Ampat atas Penggunaan Air oleh Wajib Pajak PT Gag Nickel

Kedua belah pihak telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:

1. Kepala Bapenda Papua Barat tidak memungut Pajak Air Permukaan kepada wajib pajak PT Gag Nickel terhitung mulai bulan Maret tahun 2022.
2. Kepala BP2RD Kabupaten Raja Ampat:
 - a. Memungut Pajak Air Tanah kepada wajib pajak PT Gag Nickel terhitung mulai bulan Maret tahun 2022.
 - b. Tidak meminta setoran Pajak Air Tanah kepada Bapenda Provinsi Papua Barat yang sudah dibayar oleh wajib pajak PT Gag Nickel sebagai Pajak Air Permukaan.

3. Sasaran Kegiatan 3 - Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi.

a. Indikator Kinerja Kegiatan - Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan /Ditindaklanjuti.

Capaian kinerja Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja ini diperoleh dari penugasan Audit Investigatif, Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli sebagai berikut:

No.	Uraian Penugasan	Realisasi Penugasan	Target Penugasan
1.	Audit Investigatif	2	2
2.	Audit PKKN	6	5
3.	Pemberian Keterangan Ahli	16	8
	Jumlah	24	15

Seluruh hasil penugasan telah dimanfaatkan dan ditindaklanjuti baik oleh penyidik dari Kepolisian maupun Kejaksaan serta oleh Hakim/Pengadilan pada saat persidangan.

b. Indikator Kinerja Kegiatan - Persentase Hasil Pengawasan Preventif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti.

Capaian kinerja Persentase Hasil Pengawasan Preventif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja ini diperoleh dari penugasan sebagai berikut:

No.	Jenis Penugasan	Uraian penugasan
1.	Sosialisasi dan Bimtek IEPK	a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Daerah Kota Sorong Tahun 2022
		b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 2022
		c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2022

No.	Jenis Penugasan	Uraian penugasan
2.	Sosialisasi dan Diagnostic Assessment FCP	Sosialisasi dan Diagnostic Assessment Fraud Control Plan (FCP) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Minyei Afrak Kabupaten Manokwari
3.	Coaching Clinic	Coaching Clinic terkait Implementasi Whistleblowing System (WBS) dan Fraud Control Plan (FCP) pada Inspektorat Provinsi Papua Barat
4.	Profiling Risiko Kecurangan	<p>a. Profiling Risiko Fraud atas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah Kota Sorong</p> <p>b. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah) pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Universitas Papua</p> <p>c. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan atas Kualitas Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.</p> <p>d. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan Program Keluarga Harapan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.</p> <p>e. Penyusunan Profil Risiko Kecurangan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.</p>
5.	Sosialisasi MPAK	Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) Fokus Sasaran Pendidikan Anti Korupsi pada Universitas Papua
6.	Edukasi Anti korupsi	<p>a. Narasumber Pelatihan Desa Anti Korupsi di Kabupaten Tambrauw Tahun 2022</p> <p>b. Narasumber Budaya Anti Korupsi Dalam Pelatihan Pelayanan KB Contraceptive Technology Update (CTU) Bagi Dokter Dan Bidan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>c. Workshop Pemanfaatan Digital Forensics dan Data Analytics.</p>

c. Indikator Kinerja Kegiatan - Jumlah Pemda dengan Efektifitas Pengendalian Korupsi Baik.

Capaian kinerja Jumlah Pemda dengan Efektifitas Pengendalian Korupsi Baik adalah sebesar 50% dari target yang ditetapkan. Dari 2 pemda yang ditargetkan, hanya 1 pemda yang mencapai skor IEPK sebesar 3,00 yaitu Pemda Kabupaten Sorong.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan 3 penugasan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebagai berikut:

No.	Uraian Penugasan
1.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Daerah Kota Sorong Tahun 2022
2.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun 2022
3.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2022

Untuk tahun 2023 akan diupayakan peningkatan Efektifitas Pengendalian Korupsi yang Baik pada pemda yang ditargetkan untuk memperoleh skor IEPK 3,00 melalui koordinasi dengan bidang APD dengan melakukan:

1. Monitoring pada pemda yang pada tahun 2022 lalu sudah dilakukan Sosilasi dan Bimtek IEPK namun terdapat kendala sehingga belum memperoleh skor IEPK 3,00.
2. Sosilasi dan Bimtek IEPK pada pemda-pemda yang tahun 2023 ini menjadi target skor maturitas SPIP 3,00 secara paralel dengan Bidang APD.
3. Lebih intensif memberikan contoh-contoh dokumen pemenuhan infrastruktur IEPK dan pelaksanaannya kepada pemda yang dijadikan target.

d. Indikator Kinerja Kegiatan - Jumlah Pemda Menindaklanjuti Area Of *Improvement* dengan Hasil Pengukuran EPK Baik

Capaian kinerja Jumlah Pemda Menindaklanjuti *Area Of Improvement* dengan Hasil Pengukuran EPK Baik adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini diperoleh dari hasil penugasan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut atas laporan sosialisasi dan bimtek IEPK pada Pemerintah Kabupaten Sorong, Inspektorat Kabupaten Sorong telah menindaklanjuti rekomendasi peningkatan IEPK dengan melakukan sosialisasi anti korupsi pada OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Sedangkan pada Pemerintah Kabupaten Manokwari, Inspektorat Kabupaten Manokwari telah menindaklanjuti rekomendasi terkait

peningkatan infrastruktur IEPK dengan menyusun aturan anti korupsi sebagai berikut:

- Peraturan Bupati Manokwari Nomor 217/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
- Peraturan Bupati Manokwari Tahun 2021 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi
- Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari (draft Perbup masih dalam proses di Kepala Bagian Hukum Setda)
- Risk Register atau Peta Risiko di lingkungan Kabupaten Manokwari untuk 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

B. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2022

Anggaran Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 sebesar Rp710.058.000,00 atau 9,69% dari total anggaran Perwakilan sebesar Rp7.325.692.000,00.

Realisasi anggaran Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 sebesar Rp707.907.994,00 atau terserap 99,70% dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp710.058.000,00.

C. Capaian Kinerja Lainnya (PKPT)

Selama tahun 2022, Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah melaksanakan 5 PKPT dan telah menerbitkan 51 Surat Tugas. Per 31 Desember 2022 telah diterbitkan laporannya sebanyak 51 laporan atau 100% dari jumlah Surat Tugas yang terbit.

Rincian output dari 5 (lima) PKPT tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencegahan Kecurangan

Output:

- a. Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Daerah Kota Sorong Tahun 2022.

- b. Laporan Hasil Penyusunan Profil Risiko Kecurangan atas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah Kota Sorong.
- c. Laporan Hasil Penyusunan Profil Risiko Kecurangan Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah) pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Universitas Papua.
- d. Laporan Hasil Penyusunan Profil Risiko Kecurangan atas Kualitas Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- e. Laporan Hasil Kegiatan Narasumber Pelatihan Desa Anti Korupsi pada Inspektorat Kabupaten Tambrauw Tahun 2022.
- f. Laporan Hasil Sosialisasi dan Diagnostic Assessment Fraud Control Plan (FCP) pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Minyei Afrak Kabupaten Manokwari.
- g. Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi di Pemda Kabupaten Manokwari.
- h. Laporan Hasil Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) Fokus Sasaran Pendidikan Anti Korupsi pada Universitas Papua.
- i. Laporan Hasil Konsultasi Pengawasan Penanganan Covid-19 atas Audit Investigatif maupun Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dan Audit Tujuan Tertentu Lainnya pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- j. Laporan Hasil Penyusunan Profil Risiko Kecurangan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022.
- k. Laporan Hasil Kegiatan Workshop Peningkatan Pengelolaan Proteksi Hukum dan Branding BPKP.
- l. Laporan Hasil Penyusunan Profil Risiko Kecurangan Program Keluarga Harapan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.
- m. Laporan Hasil Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2022.
- n. Laporan Hasil Kegiatan Narasumber Budaya Anti Korupsi Dalam Pelatihan Pelayanan KB Contraceptive Technology Update (CTU) Bagi Dokter Dan Bidan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- o. Laporan Hasil Kegiatan Workshop GRCCAC atas Sektor, Tema dan Topik Agenda Prioritas Pengawasan Bidang Investigasi Tahun 2023.
 - p. Laporan Hasil Kegiatan Coaching Clinic pada Inspektorat Provinsi Papua Barat Tahun 2022.
 - q. Laporan Monitoring Hasil Sosialisasi dan Bimtek Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2022.
2. Respon Kecurangan
- Output:
- a. Laporan Pemberian Keterangan Ahli di depan Penyidik atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) kepada Debitur yang Dilakukan Hapus Buku Kredit Macet pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
 - b. Laporan Pemberian Keterangan Ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw Tahun Anggaran 2016 atas nama terdakwa Petrus Titit, dkk., di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari.
 - c. Laporan Pemberian Keterangan Ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat Untuk Pembayaran Bantuan Tunai Langsung (BTL) Kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja GBI Papua Restoration For Christ Kota Sorong Tahun Anggaran 2014 atas nama terdakwa Luis Julianus Sabandafa dan Roy Hendry Siwabessy, ST di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari.
 - d. Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2018.
 - e. Laporan Pemberian Keterangan Ahli atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Bantuan Hibah kepada Kelompok Ternak Nusantara Distrik Salawati Kabupaten Sorong yang bersumber dari APBD Provinsi

Papua Barat Tahun Anggaran 2019 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari.

- f. Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Rehabilitasi Kebun Kakao pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2017.
- g. Laporan Pemberian Keterangan Ahli Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Perluasan Jaringan Tegangan Rendah dan Menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2010 atas nama terdakwa Besar Tjahjono, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari.
- h. Laporan Pemberian Keterangan Ahli di depan Penyidik Kepolisian Resor Kaimana atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Kampung Ukiara Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2015.
- i. Laporan Pemberian Keterangan Ahli pada Sidang Pengadilan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan Sport Center, Pembangunan Stadion di Komplek Sport Center Tahap I, dan Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di Komplek Sport Center pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2016 atas nama Terdakwa Agus Ruminto Aji , ST., MT bin Wagiman di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang.
- j. Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Desa pada Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018.
- k. Laporan Pemberian Keterangan Ahli di persidangan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Anggaran Kampung Kayu Merah Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016 dan 2017.
- l. Laporan Pemberian Keterangan Ahli di depan Penyidik atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana Desa Kampung Bakaro Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018.

- m. Laporan Pemberian Keterangan Ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan, Referensi, Pengayaan dan Panduan Pendidikan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2018, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari.
- n. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Pengamanan Pilkada Polres Manokwari yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemda Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2020.
- o. Laporan Pemberian Keterangan Ahli di depan Penyidik atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyalahgunaan Dana Hibah Pengamanan Pilkada Polres Manokwari yang Bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemda Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2020.
- p. Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019.
- q. Laporan Pemberian Keterangan Ahli Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Jasa Penunjang Pendidikan bagi PNS dan Non-PNS/Honorer pada Dinas Pendidikan Kota Sorong Tahun Anggaran 2019 atas nama terdakwa Alfrida Pindan, SE.,MM dan Petrus Korisano, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari.
- r. Laporan Pemberian Keterangan Ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Di Kampung Sailolof Distrik Salawati Selatan Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2017 atas nama terdakwa Ahmad Wainsaf dan Abdullah Rumonim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari.
- s. Laporan Pemberian Keterangan Ahli di Depan Penyidik Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat Babo Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2018.

- t. Laporan Pemberian Keterangan Ahli di depan Penyidik atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan, Referensi, Pengayaan dan Panduan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018.
 - u. Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021.
 - v. Laporan Pemberian Keterangan Ahli Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Perluasan Jaringan Tegangan Rendah dan Menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2010 atas nama terdakwa Paulus P. Tambing, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari secara daring.
 - w. Laporan Hasil Kegiatan Kompilasi Status Kasus Keinvestigasian Tahun 2022 di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Manokwari.
 - x. Laporan Hasil Audit Investigatif Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Dalam Bentuk Belanja Tak Terduga (BTT) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2020.
 - y. Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Kasus Keinvestigasian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Manokwari Selatan Tahun 2022.
 - z. Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hasil Penjualan (HP) Beras PNS Otonom pada Badan Usaha Logistik (Bulog) Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat Kantor Cabang Pembantu Teminabuan, Kantor Cabang Sorong, Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat Tahun 2011-2019.
3. Deteksi Kecurangan
- Output:
- a. Laporan Pengumpulan Data Terkait Industri Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Papua Barat.
 - b. Forum Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

- c. Laporan Hasil Kegiatan Monitoring Workshop Digital Forensics dan Data Analytics di Kota Sorong Tahun 2022.
 - d. Laporan Hasil Kegiatan Workshop Digital Forensics dan Data Analytics.
 - e. Laporan Coaching Clinic Implementasi Audit Tujuan Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Kaimana.
4. Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan
- a. Laporan Hasil Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Kewenangan Memungut Pajak antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Raja Ampat atas Penggunaan Air oleh Wajib Pajak PT Gag Nickel.
 - b. Laporan Hasil Kegiatan Quality Assurance atas kegiatan pengawasan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan tentang Kewenangan Memungut Pajak antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Raja Ampat atas Penggunaan Air oleh Wajib Pajak PT Gag Nickel.
5. Pengawasan atas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit
- Output:
- Laporan Audit Tujuan Tertentu atas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit di Wilayah Provinsi Papua Barat.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tujuan yang dimandatkan oleh BPKP.

Laporan kinerja (LKj) ini merupakan periode pelaporan ketiga dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat 2020-2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bidang Investigasi Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Bidang Investigasi Tahun 2022 yang telah ditetapkan, merupakan *cascading* dari Perkin Kepala Perwakilan yaitu sebanyak 7 Indikator Kinerja (IK) pada 3 Sasaran Kegiatan.

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, dari 7 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi target Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat terdapat 6 IKK yang mencapai kinerja > 100% dan 1 IKK yang belum mencapai kinerja > 100%.

B. Rencana Tindak Tahun 2023

Tahun 2023 wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melingkupi dua Provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Perubahan lingkungan tersebut menjadi tantangan lebih untuk tetap menjaga dan meningkatkan kinerja.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk menunjang kinerja tahun 2023 antara lain:

1. Meningkatkan dan mempererat hubungan kerja sama dengan mitra kerja (*stakeholders*) baik di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya melalui koordinasi dan sinergi.
2. Mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan program pencegahan korupsi.
3. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang termasuk di dalamnya peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

4. Meningkatkan pemantauan tindak lanjut atas saran/rekomendasi/*Area of Improvement* (AOI) atas hasil pengawasan BPKP.
5. Meningkatkan kompetensi SDM Perwakilan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil pengawasan.